



**KEPUTUSAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENETAPKAN
KONVERSI LANGSUNG DOLAR AUSTRALIA DENGAN
RENMINBI CINA**

**(THE DECISION OF AUSTRALIAN GOVERNMENT TO ASSIGN THE
DIRECT CONVERSION OF AUSTRALIAN DOLLAR- RENMINBI)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

PUTU AYU WULANDARI DP

NIM 10091010101

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ramida P. A.Md dan Ayahanda I Nyoman Denen S.Sos.,M.Kes tercinta;
2. Kedua adik tersayang Made Dwi Surya Ciptalyadi dan Komang Galang Erlangga;
3. Alamamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Al-Baqarah 216)¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: PT Sya'amil Cipta Media.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putu Ayu Wulandari DP

NIM : 100910101010

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Keputusan Pemerintah Australia Menetapkan Konversi Langsung Mata Uang Dolar Australia Dengan Renminbi Cina” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2014
Yang menyatakan

Putu Ayu Wulandari DP
NIM 100910101010

SKRIPSI

**KEPUTUSAN PEMERINTAH AUSTRALIA MENETAPKAN KONVERSI
LANGSUNG MATA UANG DOLAR AUSTRALIA DENGAN RINMINBI CINA**

Oleh

**PUTU AYU WULANDARI DP
NIM 100910101010**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Puji Wahono, MA

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M.Si

RINGKASAN

Keputusan pemerintah Australia Menetapkan Koversi Langsung Dolar Australia dengan Renminbi Cina; Putu Ayu Wulandari Dp, 100910101010; 2014: 70 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sejak tahun 2008, Australia merupakan produsen utama dari beberapa negara di Asia, termasuk Cina. Jumlah ekspor barang dan jasa Australia ke Cina terus mengalami peningkatan pada tahun 2010. Komoditi utama yang di ekspor ke Cina adalah sumber daya alam mentah seperti batu bara, minyak mentah, emas, dan bijih besi. Sebagai negara industri maju, Australia juga membutuhkan barang dan bahan yang di gunakan untuk mendukung proses industri dalam negerinya, sehingga Australia juga mengimpor barang-barang tersebut dari negara lain, dan sebagian besar barang yang di impor Australia adalah dari Cina. Namun, dalam transaksi perdagangan, kedua negara belum mempunyai mekanisme untuk melakukan konversi langsung antara Dolar Australia dengan Renminbi, sehingga kedua negara menggunakan Dolar AS sebagai alat transaksi. Dengan demikian semua komoditas dihargai dengan mata uang AS. oleh karena itu, Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia (2010-2013) memutuskan untuk menetapkan konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi Cina.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka (library research) untuk memperoleh data sekunder.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa alasan mengapa pemerintah Australia menetapkan konversi langsung Dolar Australia, adalah pertama beberapa negara tidak

lagi menggunakan Dolar AS sebagai alat transaksi untuk berdagang dengan Cina, dan justru menggunakan Yuan. Kedua, persepsi Julia Gillard terhadap Cina berbeda dengan pemerintah Australia sebelumnya, yang menganggap bahwa Cina sebagai ancaman. Ketiga, melalui kebijakan ini, Gillard berupaya untuk meningkatkan citra Partai Buruh Australia. Keempat, dengan adanya konversi langsung mata uang ini, maka dalam transaksi perdagangan dengan Cina, akan semakin lancar, sehingga akan semakin meningkatkan jumlah ekspor barang dan jasa Australia ke Cina. Selain itu, dengan adanya sistem konversi langsung ini dinilai lebih sederhana, sehingga akan lebih menghemat waktu dan biaya transaksi. Terakhir, pemerintah Australia mempertimbangkan stabilitas nilai tukar Yuan. Stabilitas nilai tukar Dolar Australia terhadap Yuan di sebabkan oleh surplus perdagangan Australia terhadap Cina setiap tahunnya, serta sistem “*managed exchange rate*” yang di tetapkan oleh pemerintah Cina terhadap Dolar AS. Sehingga kebijakan ini juga berdampak pada nilai tukar Dolar australia terhadap Cina, yang tetap stabil.

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Keputusan Pemerintah Australia Menetapkan Konversi Langsung Dolar Australia dengan Renminbi Cina”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Puji Wahono, MA, selaku Dosen Pembimbing Utama, Drs. Agung Purwanto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
3. Drs. Sugiyanto E. Kusuma, MA, M.Si selaku Dosen Penguji Ketua, Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D dan Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si selaku Dosen Penguji Anggota. Terima kasih atas waktu, pikiran dan perhatian yang telah diberikan, serta kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
4. Terimakasih untuk kedua orangtuaku dan kedua adiku yang selalu memberikan semangat dan doa;
5. Terimakasih kepada Tegar Haniv A. yang tiada henti memberikan semangat dan doanya selama proses pembuatan skripsi ini;
6. Terimakasih untuk sahabat terbaikku di kosan Bangkaraya 15, Dana, Vivi, Anggik

yang selalu menjadi penyemangat dan selalu menemani disaat suka dan duka selama proses pembuatan skripsi ini;

7. Terimakasih untuk sahabatku Dita Suci P atas semangat, motivasi dan doanya;
8. Untuk sahabat-sahabatku di kampus FISIP Universitas Jember Maya, Mega, Devita terimakasih telah menjadi teman terbaik, memberikan semangat, serta bantuanya selama masa kuliah;
9. Terimakasih untuk para APES yang selama ini telah saling menguatkan;
10. Terimakasih untuk teman-temanku, Ine, Tanti, Lidya, Putri, Fitra, Itah, Iyek, Dhani, Naqib, Lala, dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu;

Dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 15 Mei 2014

Penulis

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Perdagangan Australia ke Asia	36
3.2 Pasar Ekspor Australia	37
3.3 Impor Barang dan Jasa Australia dengan Cina	41
4.1 Pasar Utama Australia.....	53

DAFTAR GAMBAR

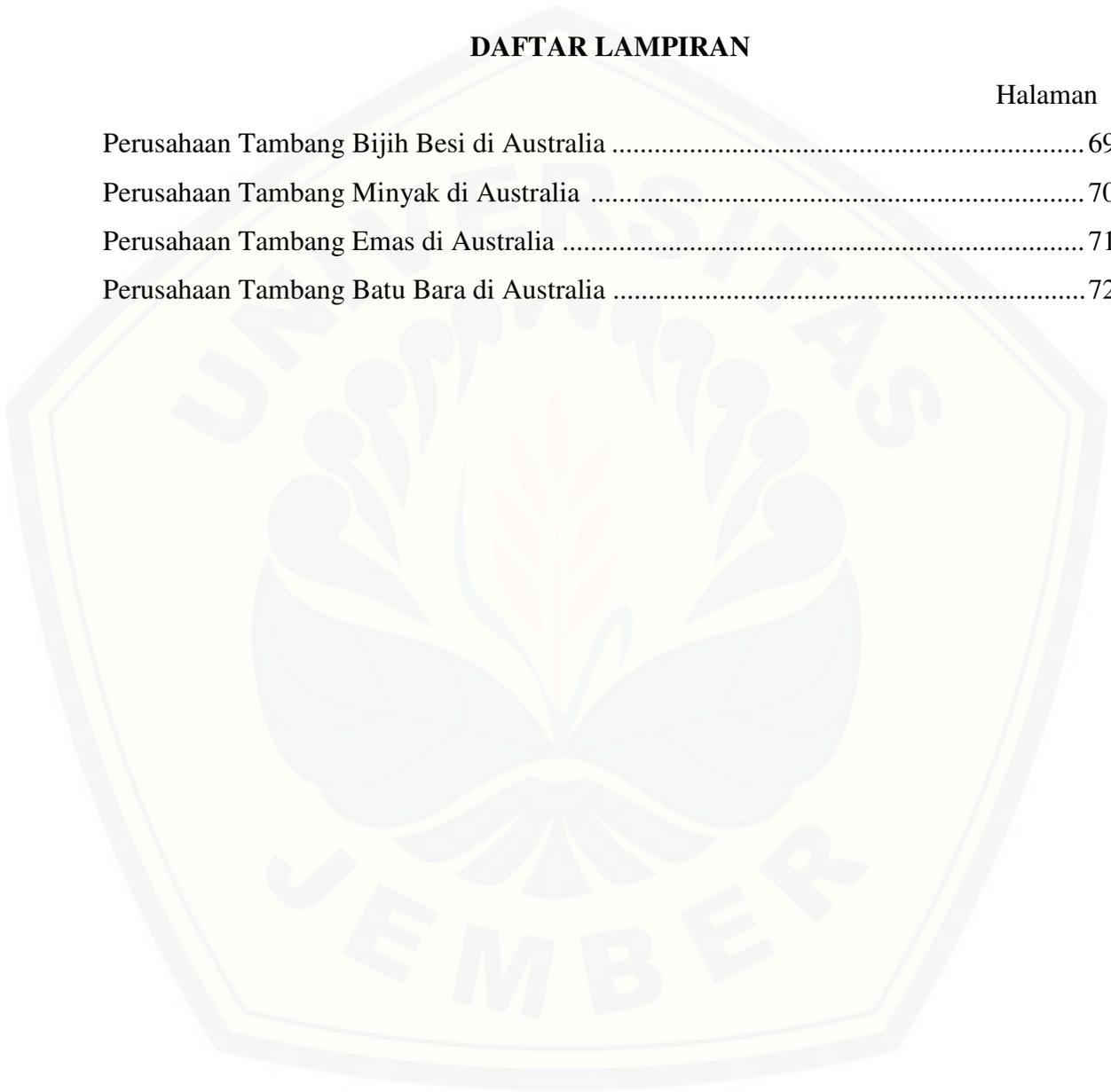
	Halaman
2.1 Sistem Pemerintahan Australia	18
3.1 Komoditi ekspor Australia ke Asia	37
3.2 Komoditi Impor Australia dari Asia	38
4.1 Skema Konversi Langsung Dolar Australia Dolar Australia Dengan Renminbi Cina	59
4.3 Perbandingan Nilai Tukar Dolar Australia dan Dolar Amerika Terhadap Yuan	60

DAFTAR SINGKATAN

ABS	= <i>Australian Bureau of Statistic</i>
AFR	= <i>ASEAN Regional Forum</i>
ALP	= <i>Australian Labor Party</i>
ANZ	= <i>Australia and New Zealand Banking</i>
APEC	= <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
ASEAN	= <i>Association of South East Asian Nation</i>
AUD	= <i>Australian Dollar</i>
CYN	= <i>Chinese Yuan</i>
GDP	= <i>Gross Domestic Product</i>
GST	= <i>Goods and Service Tax</i>
HAM	= <i>Hak Asasi Manusia</i>
HoR	= <i>House of Representative</i>
NAB	= <i>National Australia Bank</i>
OECD	= <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PBD	= <i>Product Domestic Bruto</i>
RBA	= <i>The Reserve Bank of Australia</i>
RMB	= <i>Renminbi</i>
RRC	= <i>Republik Rakyat Cina</i>
UAP	= <i>United Australian Party</i>
USD	= <i>United States Dollar</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Perusahaan Tambang Bijih Besi di Australia	69
Perusahaan Tambang Minyak di Australia	70
Perusahaan Tambang Emas di Australia	71
Perusahaan Tambang Batu Bara di Australia	72



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Pasifik saat ini sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari beberapa negara di Asia seperti India, Indonesia, Cina, dan Jepang. Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini diakibatkan oleh integrasi hubungan ekonomi intra Asia Pasifik yang berlangsung secara alamiah melalui mekanisme pasar maupun wadah kerjasama formal yaitu *ASEAN Regional Forum (AFR)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*. Perkembangan ekonomi di kawasan Asia pasifik yang terbilang cukup tinggi ini kemudian menjadikan kawasan Asia pasifik sebagai pasar baru bagi negara-negara industri maju.

Australia merupakan negara Industri maju yang melihat potensi pasar di kawasan Asia Pasifik. Hal ini di buktikan dalam buku “buku putih” Australia tahun 2012 yang di luncurkan pada Oktober 2012. Pada peluncuran “buku putih” yang berjudul “*Australia In The Asian Century*” tersebut, Perdana Menteri Australia, Julia Gillard Gillard mengatakan:

“Pada abad ini, kawasan Asia akan menjadi tempat kediaman untuk sebagian besar kelas menengah dunia dan akan menjadi penghasil barang dan jasa terbesar di dunia, serta menjadi konsumen terbesar. Skala dan kepesatan kemajuan Asia sungguh menakjubkan, sehingga menghadirkan peluang dan tantangan yang signifikan bagi seluruh warga Australia. Hubungan diplomatik Australia dengan negara-negara utama di kawasan Cina, India, Indonesia, Jepang dan Korea Selatan menjadi semakin komperhensif”.¹

1 Ministry of Train and Trade Australia. Australia In the asian century white paper dalam <http://www.asiaeducation.edu> . Diterbitkan pada 10 Oktober 2012. (Diakses pada 15 Oktober 2013)

Pidato tersebut menjelaskan bahwa, kebijakan luar negeri pemerintahan Julia Gillard lebih mengarah ke Asia. Gillard menilai bahwa peningkatan ekonomi di Asia Pasifik menjadi peluang bagi Australia. Peluang besar Australia adalah untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pasar Asia Pasifik. Australia akan menjadi negara produsen barang dan jasa bagi negara-negara di Asia pasifik.

Sejak tahun 2008, Australia merupakan produsen utama dari beberapa negara di Asia, termasuk Cina. Cina merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik saat ini, sekitar 12% pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari pertumbuhan ekonomi Cina.² Cina juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia hingga mencapai satu milyar jiwa,³ sehingga menjadikannya sebagai negara dengan tingkat konsumen tertinggi di dunia, dan tersebut akan sangat menguntungkan Australia, untuk peningkatan ekspornya ke Cina.

Sejak tahun 2010, jumlah ekspor barang dan jasa Australia ke Cina terus mengalami peningkatan, komoditi utama yang diekspor ke Cina adalah berupa sumber daya alam mentah seperti batu bara, minyak mentah, emas, dan bijih besi. Besarnya jumlah ekspor barang Australia ke Cina yang mengalami peningkatan setiap tahunnya disebabkan oleh proses industrialisasi Cina. Namun Cina ternyata tidak hanya sebagai pasar ekspor terbesar Australia. Sebagai negara industri maju, Australia juga membutuhkan barang dan bahan yang digunakan untuk mendukung proses industri dalam negerinya, maka Australia juga mengimpor barang-barang tersebut, dan sebagian besar adalah berasal dari Cina. Barang-barang yang diimpor Australia dari Cina berupa kebutuhan sandang berupa baju, bantal, dan kain. Serta beberapa perangkat elektronik seperti *Central Processing Unit (CPU)* komputer dan telepon genggam.

Berdasarkan besarnya arus perdagangan Australia dengan Cina, sehingga dapat dikatakan Australia menjadikan Cina sebagai partner dagang terbesarnya. Namun, dalam

2BBC UK. Pertumbuhan Cina dalam <http://www.bbc.co.uk>. Diterbitkan pada 1 Januari 2011. (Diakses pada 5 November 2013)

3 *ibid*

transaksi perdagangan, kedua negara belum mempunyai mekanisme untuk melakukan konversi langsung antara Dolar Australia dengan Renminbi, sehingga kedua negara menggunakan Dolar AS sebagai alat transaksi. Dengan demikian semua komoditas dihargai dengan mata uang AS. Hal ini terbilang rumit dan kurang efisien bagi kedua negara dalam transaksi bisnis. Selain itu, saat ini tidak ada aturan internasional yang mengatakan bahwa semua kontrak perdagangan harus menggunakan mata uang Dolar AS.⁴

Berdasarkan fakta tersebut Perdana Menteri Australia memutuskan untuk membuat kesepakatan pertukaran mata uang secara langsung dengan Cina. Keputusan tersebut juga tertuang dalam “*Australia White paper*” 2012, bahwa Australia akan melakukan kerjasama mata uang dengan Cina guna menjaga stabilitas nilai Dolar Australia, sehingga pada Maret 2013, Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Presiden Republik Rakyat Cina (RRC), Xin Jinping mencapai sebuah kesepakatan tentang konversi langsung mata uang Dolar Australia (AUD) dengan Renminbi (RMB). Dengan ditetapkannya konversi langsung mata uang ini, masyarakat masing-masing negara dapat secara langsung menukar Dolar Australia dengan Yuan tanpa harus terlebih dahulu menukar ke Dolar AS. Begitu pula sebaliknya, Yuan dapat di tukar secara langsung dengan Dolar Australia tanpa harus menggunakan Dolar sebagai mata uang perantara.

Sejak tahun 2008, Cina memang gencar dalam mempromosikan Yuan terhadap pasar internasional. Hal ini dilakukan dengan sebuah ambisi, bahwa suatu saat Yuan dapat menjadi mata uang dunia Internasional seperti Dolar Amerika (USD) dan Euro. Cina memang telah mengenalkan konversi Yuan ke Dolar Australia kepada pasar valas dalam negerinya November pada 2011⁵. Sebelumnya konversi keduanya bersifat tidak langsung, karena Yuan harus ditukar ke Dolar AS terlebih

4 Internasional Kontan. Renminbi Mulai Diterima di Pasar Australia. dalam <http://internasional.kontan.co.id/news/renminbi-mulai-diterima-pasar-australia> di terbitkan pada 28 Januari 2013 (diakses pada 2 Maret 2014)

5 Indo WJS. Australia-China Sepakati Kerjasama Mata Uang. Dalam <http://indo.wsj.com/posts/2013/04/08/> . diterbitkan pada 4 Agustus 2013.(diakses pada 27 September 2013)

dahulu, baru kemudian ditukar dengan Dolar Australia. Selain itu, hal ini merupakan pertama kalinya Australia melakukan kerjasama pertukaran mata uang secara langsung. Sebelumnya Jepang terlebih dahulu melakukan kerjasama konversi langsung mata uang dengan Cina.

Keputusan pemerintah Australia dalam konversi langsung mata uang tersebut erat kaitannya dengan kepentingan yang ingin dicapai pemerintah Australia yaitu kepentingan ekonomi dan politik terkait “buku putih” Australia. Disepakatinya konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Yuan akan menjadi suatu keuntungan besar bagi kelancaran arus ekspor barang dan jasa Australia ke Cina. Tidak hanya bagi bisnis besar, juga bagi perusahaan kecil dan menengah yang ingin melakukan bisnis di Cina. Pada tahap awal konversi langsung tersebut, *Australia and New Zealand Banking (ANZ)* dan *Westpac* akan menjadi dua bank di Australia yang mempunyai otoritas membuka penukaran mata uang di Cina⁶. Sebagai penanggung otoritas moneter⁷, bank sentral Australia atau *The Reserve Bank of Australia (RBA)* memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar Dolar Australia. Selain itu, RBA juga dibebani tanggung jawab sebagai bankir untuk pemerintah Australia, dalam menerbitkan mata uang Dolar Australia dan mengelola cadangan devisa Australia.

Keputusan pemerintah Australia untuk melakukan konversi langsung mata uang dengan Yuan juga sebagai bentuk upaya pengintegrasian hubungan ekonomi dan politik dengan Cina. Pendekatan hubungan ekonomi dan politik tersebut tidak lepas dari stabilitas politik di Cina. Suatu negara pada hakikatnya membutuhkan stabilitas politik guna memastikan reformasi ekonomi berjalan dengan baik. Sistem

⁶ *ibid*

⁷ Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, dan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang.

politik apapun, tidak akan ada maknanya bagi peningkatan pembangunan ekonomi, jika tidak menjamin kestabilan politik. Hal ini sangat menarik, merujuk pada “buku putih” tahun 2009 bahwa Australia harus bersikap hati-hati dengan modernisasi militer Cina, sehingga secara politik dan keamanan Australia melihat Cina sebagai ancaman. Kebijakan Australia yang tertuang dalam “buku putih” 2009 tersebut juga merupakan hasil dari konstruksi Amerika Serikat bahwa ancaman bagi negara selanjutnya adalah komunis, di mana Cina merupakan negara komunis terbesar saat ini. Namun, jika dibandingkan dengan kebijakan luar negeri pemerintah Australia dalam “buku putih” tahun 2012, Julia Gillard justru melihat bahwa peningkatan hubungan ekonomi di Asia terutama Cina merupakan langkah untuk membentuk rasa saling percaya (*Confidence Building Measur*). Hal ini diimplementasikan dalam bentuk kerjasama konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Cina sebagai langkah awal dalam menjalin kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan Cina.

Berdasarkan uraian diatas, situasi tersebut sangat terkait dengan studi Hubungan Internasional terutama dengan mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Selain itu, perkembangan ekonomi politik dalam hubungan Australia dan Cina sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai sebuah karya ilmiah, sehingga penulis mengangkat judul skripsi sebagai berikut:

“Keputusan Pemerintah Australia Menetapkan Konversi Langsung Mata Uang Dolar Australia Dengan Renminbi Cina”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu karya ilmiah merupakan hal yang penting bagi penulis untuk memberikan batasan lingkup pembahasan yang jelas, yang tujuannya agar penelitian semakin terarah dan jelas serta mencegah penelitian ini terlalu luas dan melenceng dari konteks pembahasan. Penulis memberikan batasan ruang lingkup pada:

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi dalam skripsi ini adalah tentang alasan Australia untuk melakukan konversi langsung mata uangnya dengan Renminbi. Secara sederhana, konversi mata uang adalah pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Sehingga dalam karya tulis ini, yang dimaksud dengan konversi langsung mata uang adalah pertukaran langsung mata uang secara fisik antara Dolar Australia dengan Yuan, sehingga kedua negara tidak perlu menyesuaikan mata uang masing-masing dengan Dolar AS. Karya ilmiah ini akan membahas mengenai alasan keputusan Julia Gillard menetapkan konversi langsung Dolar Australia dengan Renminbi.

Renminbi adalah nama resmi mata uang Cina. Renminbi disingkat dengan RMB. Sebagaimana Rupiah disingkat dengan IDR (Indonesian Rupiah). Renmimbi pertama kali diperkenalkan bank sentral Cina tahun 1948, setahun sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina.⁸ Yuan yang disingkat dengan CNY (*Chinese Yuan*) adalah unit utama mata uang Cina atau satuan hitungnya. Nilai 1 RMB = 1 Yuan, hanya saja dalam penggunaannya sebagai alat transaksi jual beli, satuan hitungnya adalah Yuan. Sedangkan untuk penyebutan nilai mata uang kurang dari 1 Yuan, biasanya menggunakan satuan hitung Jiao.

1.3 Batasan waktu

Batasan waktu dalam penulisan karya ilmiah ini dimulai sejak Juni 2010, ketika Perdana Menteri Julia Gillard resmi menjabat sebagai PM di Australia sampai pada tercapainya kesepakatan Konversi Dolar Australia dan Renminbi Cina pada tahun 2013. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tahun-tahun yang memiliki

⁸ Kompas. Yuan atau Renminbi. Dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2010/07/28/yuan-atau-renmimbi-207254.html> di terbitkan pada 28 agustus 2010 (diakses pada 10 Oktober 2013

keterkaitan dengan permasalahan ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena dalam sebuah kebijakan akan berlaku berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan mengangkat permasalahan yang difokuskan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

“ Mengapa Pemerintah Australia menetapkan Konversi langsung Mata Uang Dolar Australia dengan Renminbi Cina?”

1.4 Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan diatas, penulis berupaya untuk dapat menjelaskan tujuan dari penelitian yang penulis jadikan acuan bagi skripsi ini. Tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah untuk menjelaskan alasan utama Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard melakukan perjanjian konversi mata uang Dolar Australia dengan Reninbi Cina.

1.5 Landasan Pemikiran

Landasan pemikiran menjadi bagian yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan teori dan konsep untuk membaca dan memahami suatu fenomena Hubungan Internasional. Menurut Mochtar Mas' oed :

“konsep adalah suatu simbol yang penting dalam bahasa. Suatu Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau sesuatu fenomena. Jadi konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Ia bukan suatu yang asing .

Kita menggunakannya sehari – hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal – hal yang kita temui berdasar ciri – cirinya yang relevan”.⁹

Sementara itu, definisi teori menurut Charles A McClelland dan Segel adalah:

serangkaian *statement* yang saling berkaitan, yang terdiri dari:

1. kalimat – kalimat yang memperkenalkan istilah – istilah yang merujuk pada konsep – konsep dasar teori itu. 2. Kalimat – kalimat yang menghubungkan konsep – konsep dasar itu satu sama lain. 3. kalimat – kalimat yang menghubungkan beberapa *statement* teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan objek pengamat empiris (hipotesis).¹⁰

Untuk itu dalam karya ilmiah penulis menggunakan teori *Rational Choice Theory* (*Teori Pilihan Rasional*) sebagai alat analisa dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan. *Rational Choice Theory* pada dasarnya merupakan pemahaman perkembangan aliran pemikiran dari paham rasionalitas Eropa Barat, yaitu paham teori yang muncul pada abad pertengahan, sebagai antitesis atas pemikiran paham naturalis. Pilihan rasional sebagai model penjelasan dari tindakan-tindakan manusia, dimaksudkan untuk memberikan analisa formal dari pengambilan keputusan rasional berdasarkan sejumlah kepercayaan serta tujuan.¹¹

1.5.1 *Rational Choice Theory*

Teori pilihan rasional sebagai sebuah pendekatan digunakan untuk memahami bagaimana elite politik menentukan kebijakan-kebijakan politik berdasarkan pertimbangan pilihan-pilihan rasional. Pilihan rasional merujuk pada perilaku

⁹Mochtar Mas’ oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:LP3ES Hal.93 – 94.

¹⁰Gravin McCain dan Erwin Segel, *The game of Science* dalam buku Mochtar Mas’ oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta:LP3ES. Hal. 219

¹¹F.C SusilaAdiyanta. MMH Vol. 37, No.2. Juni 2008. “*Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)*”. Universitas Diponegoro : Semarang, Hal. 1

manusia sebagai makhluk ekonomi, yang bertindak karena ada motivasi insentif, yang dalam pengambilan keputusannya, selalu ingin memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Teori ini menempatkan manusia sebagai makhluk rasional. Menurut Down, rasionalitas manusia akan selalu dapat membuat peringkat pilihan sehingga dengan cara itu dapat dibandingkan kelebihan dan kekurangannya. Meskipun peringkat pilihan tersebut dapat berubah, tetapi ia selalu memilih alternatif yang peringkatnya tertinggi dari rangkaian pilihannya itu dan selalu membuat pilihan yang sama setiap kali dihadapkan pada alternatif yang sama. Rasionalitas merujuk pada proses tindakan, bukan pada hasil akhir atau bahkan keberhasilan dalam mencapai suatu keinginan.¹²

Dalam Bukunya Linklater yang digagas oleh Duncin Snidal teori pilihan rasional memiliki tiga asumsi dasar yaitu pertama, aktor baik individu maupun negara diasumsikan bergerak secara rasional dengan *self Interest*. Kedua, kepentingan setiap aktor bersifat eksogen di mana kepentingan itu telah ada sebelum aktor memutuskan untuk masuk ke dalam suatu hubungan sosial. Ketiga, masyarakat adalah area pertemuan strategi para aktor yang berusaha memaksimalkan kepentingannya.¹³

Asumsi dasar tersebut merupakan sebuah penyederhanaan tentang keputusan individu mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan dari pembuat keputusan yang diambil. Individu sebagai pengambil keputusan tidak hanya memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda, tetapi juga memiliki kepribadian unik, pengalaman pribadi, kemampuan intelektual, dan gaya dalam membuat keputusan.¹⁴

Dalam konteks pilihan rasional, setiap kebijakan dan pilihan elit politik dalam pemerintahan, sangat dipengaruhi pula oleh motif-motif mencari keuntungan dan kemanfaatan diri si pelaku (elite politik), yang tidak jarang berseberangan dengan nilai-nilai reformis demokrasi. Perilaku bernegara sebagai hasil akhir dari pilihan rasional yang dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kepentingan-kepentingan

12 Robert Vam Niel. Munculnya elit modern Indonesia. Jakarta pustaka jaya 1984 hal 12

13 Linklater, Andrew. 2005 Rational in handbook of International Relations, Macmillan Press: London, hal 75

14 *ibid*

pribadi, yang bertindak dalam kerangka institusi tertentu dan dalam konteks yang nyata.¹⁵

Apabila direfleksikan pada sosok politisi, maka ia hanya bersikap dan bertindak apabila benar-benar telah didahului dengan pertimbangan yang rasional, terkait dengan apakah yang akan ia korbankan, sebanding atau tidak dengan yang akan ia peroleh di dalam sebuah struktur kepolitikan yang telah mapan struktur insentifnya. Politisi dalam pengambilan kebijakan selalu bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan kalkulasi biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh.¹⁶

Teori Pilihan Rasional kemudian menjadi alat analisa yang relevan untuk menjelaskan dinamika perilaku aktor politik sebagaimana yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini. Bahwa dalam mencetuskan sikap dan kebijakan politik, para aktor senantiasa terkait dengan aspek-aspek rasionalitas politik. Dalam hal ini aktor politik yang menjadi pembuat kebijakan atau *Decision Maker* adalah Julia Gillard. Julia Gillard mempertimbangkan aspek-aspek rasional yang muncul sebagai sebuah pertimbangan mengapa dirinya harus membuat suatu kebijakan.

Dalam analisa mengenai keputusan pemerintah Australia menetapkan konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi ini penulis melihat adanya motif ekonomi dan politik yang ingin dicapai Julia Gillard, baik untuk kepentingan partainya maupun kepentingan negara secara luas. Secara politis keterkaitan antara partai politik dan balutan ideologi yang menjadi satu kesatuan di dalam kondisi politik domestik yang pada akhirnya mempengaruhi mengapa kebijakan tersebut diambil oleh pembuat kebijakan.

Perilaku aktor politik juga dipengaruhi oleh kepentingan yang ingin dicapai dalam sebuah struktur pemerintahan yang mapan. Kemudian, partai politik sendiri

15 Barbara Geddes. *Politician's Dillema, Building state capacity in Latin America*, (Barkley: university of California Press,1994) Hal.8

16 Juhn Turnr, *the policy process London and new York* : Routledge, 2002 hal 456

didefinisikan sebagai salah komponen infrastruktur politik yang mempunyai fungsi utama yaitu mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan.¹⁷

Banyaknya partai politik yang muncul juga akan menyebabkan banyaknya ideologi serta kepentingan politik setiap aktor politik yang terlibat dalam sebuah sistem politik. Selanjutnya akan menjadi dasar pemikiran mereka dalam memainkan peran politiknya. Dalam sebuah partai, ideologi biasanya digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan. Selain ideologi yang berbeda-beda, kepentingan politik yang ada berbeda pula. Setiap partai politik juga mempunyai tokoh pemimpin masing-masing sebagai *bargaining position* untuk memperkuat pengaruhnya di kancah politik. Julia Gillard dalam hal ini merupakan aktor yang menjadi representasi negara sebagai pembuat kebijakan. Partai Politik dan ideologi yang membangun pribadi Julia Gillard menjadi faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan yang diambilnya. Artinya, keputusan Julia Gillard dalam menetapkan konversi langsung Dolar Australia dengan Renminbi tersebut di landasi oleh ideologi partai dan keinginan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pamor dari partai politiknya.

Sedangkan secara ekonomi, Julia Gillard juga mengkalkulasikan “*cost and benefit*” dari keputusannya dalam konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi. Rasionalitas Julia Gillard dalam memutuskan konversi langsung tersebut, didasari oleh pemikiran ketika beberapa negara yang melakukan transaksi bisnis dengan Cina telah menggunakan Yuan sebagai alat pembayaran transaksi, maka sudah saatnya Australia menerapkan hal serupa. Sehingga, adanya kerjasama mata uang ini, akan turut memperlancar perdagangan Australia dengan Cina.

17 Robert Michels. 1984. *Partai Politik : Kecenderungan Oligarkhis dan Birokrasi*. Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 92

1.5.2 Konsep *Foreign Exchange rate*

Definisi nilai tukar atau kurs (*foreign exchange rate*) antara lain dikemukakan oleh Olivier Blanchard¹⁸ dalam bukunya "*Macroeconomics*" adalah : "*Nominal exchange rate as the price of the domestic currency in term of foreign currency*" dan Frank J. Fabozzi dan Franco Modigliani¹⁹ memberikan defenisi

mengenai nilai tukar sebagai berikut:

"*An exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchanged per unit of another currency, or the price of one currency in terms of another currency*"

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat ditukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Sistem nilai tukar sangat tergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam tiga bentuk yaitu: 1. *Fixed Exchange Rate System*, 2. *Floating Exchange Rate System*, 3. *Managed Floating rate*.²⁰

1. *Fixed Exchange Rate System*

Sistem ini mulai diterapkan pada pasca perang dunia kedua yang ditandai dengan digelarnya konferensi mengenai sistem nilai tukar yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944.²¹ Dalam sistem tersebut setiap negara masih menggunakan emas sebagai alat tukar (mata uang) mereka dan sistem penukaran yang dilakukan ialah fixed exchange rate (kurs tetap). Setiap negara menggunakan emas sebagai mata uangnya, sehingga cadangan internasional yang

18Blanchard, Olivier, *Macroeconomics Fourth Edition*, Prentice Hall, New Jersey, 2006.

19 Frank J. Fabozzi dan Modigliani, Franco, *Capital Markets*, Prentice Hall, New Jersey, 1995 dalam The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, Gramedia, Jakarta, 2002.

20 Heli Charisma Berlianta. (2005). *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

21 *Opcit.* Robert Gilpin. Hal 13

harus dimiliki setiap bank sentral dalam tiap negara juga harus berupa emas. Prinsip dasar sistem moneter ini ialah kurs semua mata uang dianggap baku (*fixed*) serta bank sentral setiap negara diharuskan melakukan jual beli emas berdasarkan harga yang telah ditetapkan, maka setiap satuan uang selalu bisa ditukar dengan emas murni seberat gram yang telah ditentukan di bank sentral.

2. *Floating Exchange Rate System*

Setelah runtuhnya *Fixed Exchange Rate System* maka timbul konsep baru yaitu *Floating Exchange Rate System*. Pasca Perang Dunia II, kondisi ekonomi internasional dalam keadaan terpuruk. Ketika ketimpangan terjadi di salah satu sektor, dan memberikan dampak pada sektor lain. Karena inflasi tinggi yang dialami AS, menjadikan sistem *Fixed exchange rate* ini harus berakhir.²² Sehingga muncul sistem baru *floating exchange rate*. Dalam konsep ini nilai tukar valuta dibiarkan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Fakta yang terjadi di banyak negara di dunia menganut varians dari kedua sistem pokok nilai tukar diatas.

3. Sistem Mengambang Terkendali (*Managed Float*)

Sistem ini muncul pada tahun 1994²³, di mana dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan satu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinyu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya cadangan devisa yang menipis. Untuk mendorong ekspor, otoritas moneter akan melakukan intervensi agar nilai mata uang menguat.

Pasar valas merupakan sebuah contoh dari pasar yang sangat kompetitif. Di pasar ini ada banyak pembeli dan penjual dari suatu produk yang homogen. Setiap pembeli dan penjual relatif kecil dibanding seluruh pasar, sehingga tidak ada seorang

22 Robert Gilpin. *Global Political Economy Understanding The International Economy Order*. In the United Kingdom: Princeton University Press, 3 Market Place, Woodstock, Oxfordshire OX20 1SY

23 Hu XiaoLian. *A Managed Floating Exchange Rate Regime is an Established Policy*. 2010

pembeli atau penjual pun yang dapat mempengaruhi nilai tukar secara berarti. Pada sistem nilai tukar “mengambang bebas”, pemerintah tidak melakukan intervensi di pasar valas dan membiarkan nilai tukar dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan di pasar bebas. Di lain pihak, pada sistem nilai tukar ‘mengambang terkendali’, pemerintah kadang kala melakukan intervensi sebagai upaya untuk mencegah pergerakan nilai tukar yang dipandang ekstrim atau bertentangan dengan kepentingan nasional.²⁴

Menurut Gubernur Bank Sentral Cina Zhou Xiaochuan, Sejak pertengahan 2008 kurs Yuan terhadap Dolar AS dipatok bukan oleh pasar, melainkan berdasarkan kajian para ekonom Pemerintah China. Tujuan utamanya adalah mencegah Yuan menjadi ajang spekulasi yang bisa mengacaukan nilai kurs.²⁵ Cina menggunakan sistem “ mengambang terkendali” atau “*managed exchange rate*”, dengan kebijakan ini, artinya pemerintah Cina menetapkan batas toleransi kenaikan dan penurunan terhadap kurs harian yang di tetapkan . Apabila Nilai tukar Yuan terhadap Dolar melemah atau menguat melebihi batas yang di tentukan, maka bank sentral Cina akan membeli atau menjual mata uang mereka, guna menjaga agar nilai tukar Yuan tetap stabil.

Cina sadar terhadap kekuatan dahsyat eksternal berupa modal para spekulan dunia yang bisa mengacaukan kestabilan ekonomi. Cina menyadari stabilitas kurs mata uang adalah salah satu esensi dari kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, kurs Yuan ditentukan oleh pemerintah sendiri. Bukan berdasarkan pada sistem tukar “mengambang bebas”. Dengan kebijakan ini, maka nilai Yuan akan tetap rendah. Bank sentral akan membeli atau menjual mata uang mereka sendiri untuk mempertahankan keseimbangan pasangan mata uang. Namun lain halnya dengan

24Sawaldjo Puspoprano. (2004), *Manajemen Bisnis: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit PPM, hal. 219

25 Morris Goldstein. *China and the Renminbi Exchange Rate*. Dalam http://brupt.com/search.php?cx=partner-pub-5966415209736484%3A5uktsc-uupw&cof=FORID%3A10&q=china and the renminbi exchange rate&as_filetype= (diakses pada 2 Juni 2014)

Australia, pemerintah Australia tidak mengintervensi secara langsung dalam menetapkan nilai kurs negaranya. Australia justru menggunakan sistem penetapan kurs “mengambang”, di mana pemerintah tidak bertanggung jawab dalam menentukan nilai tukar Dolar Australia. Nilai tukar Dolar Australia justru di tentukan oleh pasar, berdasarkan jumlah ekspor dan impor barang Australia. Namun dalam keputusan pemerintah Australia yang menetapkan konversi langsung Dolar Australia dengan Yuan, merupakan sebuah upaya moneter Julia Gillard untuk menciptakan nilai tukar Dolar Australia terhadap Yuan tetap stabil. Pemerintah memang tidak secara langsung mematok harga Dolar Australia sebagaimana “*fixed exchange rate*”, namun dengan adanya keputusan konversi langsung ini, secara tidak langsung akan berdampak pada kestabilan nilai tukar Dolar Australia terhadap mata uang Yuan.

Berdasarkan data dari *Bank of China*, pada bulan Juli 2005 hingga Juni 2009, nilai tukar Yuan terhadap Dolar naik dari 8,28 per 1 Dolar AS ke 6.88 per 1 Dolar AS. hal ini berarti Cina telah merevaluasi nilai Yuan terhadap Dolar sebesar 21%.²⁶ Namun, setelah dampak krisis keuangan global 2008, pada tahun 2009 hingga 2010, pemerintah Cina menghentikan revaluasi Yuan dan kemudian menetapkan nilai tukar Yuan terhadap Dolar AS dalam nilai yang relative konstan pada 6.83 Yuan per 1 Dolar AS, dengan alasan dari pihak pemerintah Cina untuk membantu melindungi dan membatasi dampak dari penurunan tajam akibat krisis dalam permintaan global untuk produk-produk Cina.

Dalam penggunaan sistem “*managed exchange rate*”, bank sentral Cina menggunakan sistem, *currency boards*. Sistem ini merupakan aturan di mana bank sentral memegang mata uang asing yang cukup banyak untuk mendukung setiap unit mata uang domestik. Dengan kata lain pemerintah Cina harus memiliki cadangan devisa yang kuat untuk menetapkan nilai tukar yuaan terhadap Dolar. Sebagai contoh, bank sentral cina akan memegang 1 Dolar untuk setiap Yuan. sehingga, tidak peduli berapa banyak Yuan yang di tukarkan ke bank sentral Cina, bank sentral Cina

²⁶ *Opcit.* Hu Xiaolian. Hal 14

tidak akan kehabisan Dolar. Implikasi dari sistem *currency boards* yang di gunakan oleh Cina terhadap Dolar As adalah pemerintah Cina dapat terus mematok dan mengontrol nilai setiap satuan mata uang Yuan terhadap Dolar dengan cara membeli Dolar AS untuk membuat nilai tukar Yuan tetap stabil terhadap Dolar AS.

1.6 Argumen Utama

Dalam sebuah penelitian sosial, argumen utama merupakan jawaban sementara yang kebenarannya perlu diuji secara empirik. Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam karya ilmiah ini, maka penulis mengajukan argumen utama bahwa keputusan pemerintah Australia menetapkan konversi langsung mata uang Dolar Australia terhadap Renminbi, berdasarkan pertimbangan *Rational Choise* adalah:

Keputusan Julia Gillard menetapkan konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi Cina di pengaruhi oleh motif politik dan ekonomi. Julia Gillard merupakan Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh Australia, sehingga secara politis kepentingan Gillard terkait keputusannya tersebut merupakan upaya Julia Gillard untuk meningkatkan popularitas partai buruh Australia. Persepsi Julia Gillard terhadap Cina secara ekonomi dan politik juga menjadi landasan rasionalitas dari keputusan konversi langsung tersebut.

Kemudian secara ekonomi, Julia Gillard mengkalkulasikan "*cost and benefit*" dari konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi. "*cost and benefit*" tersebut seperti pertimbangan efisiensi biaya dari penggunaan Yuan, stabilitas nilai tukar Yuan terhadap Dolar AS, hingga untuk memperlancar proses transaksi bisnis Australia dengan Cina.

1.7 Metode Penelitian

Salah satu syarat penting dalam penulisan karya ilmiah adalah metode penelitian. Di mana metode penelitian merupakan suatu teknik untuk mencari, memperoleh, dan mengumpulkan data, baik itu data primer maupun sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran atau data sebagai hasil penelitian. Metode penelitian terbagi atas dua bagian yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa data.

1.7.1 Metode Pengumpulan data

Dalam karya ilmiah ini, penulis menerapkan studi kepustakaan (*Library Research*) sehingga data tersebut diperoleh tidak secara langsung berasal dari sumber data, atau obyek penelitian, namun berasal dari berbagai macam literatur guna menunjang jalannya penulisan karya ilmiah. Adapaun data-data yang didapat penulis didapat dari:

1. Buku-buku literatur dengan relevansi terhadap tema yang diangkat
2. Data dari situs internet termasuk situs resmi pemerintah
3. Data dari surat kabar, jurnal ilmiah, dan koran
4. Koleksi pribadi seperti seperti slide dan catatan kuliah

Adapun tempat untuk memperoleh data-data tersebut antara lain:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan pusat Universitas Jember.

1.7.2 Metode Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkatagorikan data sehingga dapat menentukan dan merumuskan suatu argumen utama berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan

metode penelitian yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen, buku, jurnal dan surat kabar. Dalam penelitian deskriptif, penulis dituntut untuk dapat menganalisis, menginterpretasikan, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu penelitian.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Kelima bab tersebut adalah :

BAB 1

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2

Dalam bab ini akan membahas gambaran secara umum tentang sistem pemerintahan Australia, buku putih australia tahun 2009 dan 2012 serta sejarah singkat partai buruh di Australia.

BAB 3

Bab ini berisi tentang uraian tentang sistem ekonomi australia, sistem ekonomi Cina, perdagangan barang dan jasa australia dengan Cina, hingga proses konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi.

BAB 4

Bagian ini akan menjawab masalah yang ada dalam karya ilmiah ini, sebagai hasil dari penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang beberapa alasan Australia menandatangani kesepakatan konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Reninbi Cina pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard.

BAB 5

Pada bab terakhir ini, akan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dalam karya ilmiah ini.

BAB 2. GAMBARAN SISTEM POLITIK, SISTEM EKONOMI, DAN BUKU PUTIH AUSTRALIA

Australia adalah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Negara Australia terdiri atas enam negara bagian dan dua teritorial. Negara bagian di Australia yaitu New South Wales, Australia Selatan, Queensland, Victoria, Tasmania dan Australia Barat, sedangkan Australia Utara dan Canberra merupakan wilayah teritorial. Negara bagian dan teritorial bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak ditentukan kepada pemerintah federal seperti masalah kesehatan, pajak rumah sakit, dan urusan pendidikan setiap negara bagian.

Australia secara signifikan mengintegrasikan nilai-nilai tradisi dan budaya politik yang dianut Inggris dalam politik dan pemerintahan di dalam negeri. Australia merupakan negara persemakmuran Inggris di mana Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jendral di Australia. Konstitusi Australia mengatur berdirinya sebuah pemerintahan federal yang bersifat nasional, dan bertindak atas nama Australia. Konstitusi juga mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Konstitusi Australia menetapkan tugas Pemerintah federal, seperti hubungan luar negeri dan perdagangan, pertahanan, dan imigrasi sedangkan untuk negara bagian, mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai sebuah parlemen, majelis rendah dan mejelis tinggi. Negara bagian mengatur hal-hal

seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan perlindungan margasatwa.

2.1 Sistem Parlemerter Australia

Australia merupakan negara persemakmuran dengan sistem pemerintahan Parlemerter. Dalam sistem pemerintahan Australia, penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Perdana Menteri dan para menteri-menteri, yang disebut sebagai Dewan eksekutif federal.

Dalam sistem perlemerter, menteri-menteri bukanlah pembantu Perdana Menteri dan tidak bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, melainkan mereka bertanggung jawab kepada perlemen baik secara individual (*individual responsibility*) maupun secara kolektif sebagai anggota kabinet (*Collective Responsibility*). Seorang menteri harus memberikan laporan secara teratur kepada partainya dan parlemen, hal ini sebagai penerapan dari sistem “*check and balance*” dari sistem pemerintahan Westminster di Australia, di mana semua yang memiliki otoritas atau kewenangan harus membuat pertanggung jawaban kepada parlemen.²⁷

Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintah yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif beranggotakan para Majelis rendah atau *House of representative* (HoR) dan Senat, di mana badan Legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Badan eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif terdiri dari pengadilan tinggi, yang bertanggung jawab dalam proses peradilan serta mengangkat dan memberhentikan para hakim.

²⁷Richard H. Chauvel, *Politics Down Under : Kehidupan Politik Dalam Negeri Australia*, dalam jurnal ilmu politik 6.



Gambar 2.1 Sistem Pemerintahan Australia

Sistem Pemerintahan Australia

Sumber: http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf

Secara konstitusional, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Gubernur Jenderal, berdasarkan atas saran-saran dari Dewan Eksekutif. Dewan Eksekutif sendiri adalah menteri-menteri yang terdiri anggota perlemen dari partai mayoritas di dalam majelis rendah (*House Of representative*), yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Semua kekuasaan konstitusional Gubernur jenderal hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan saran dari Dewan Eksekutif Federal. Oleh karena itu, kekuasaan Gubernur Jenderal sering disebut dengan *reserve-power* atau “kekuasaan cadangan”. Posisi eksekutif di Australia, seperti halnya di Inggris hanya dianggap sebagai simbol pemerintah saja dan tidak banyak berperan dalam menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, Perdana Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan memiliki otoritas sangat penting dalam perpolitikan Australia, termasuk dalam kepentingan luar negeri Australia dan hubungan antarnegara.

2.2 Arah Politik Luar Negeri Partai Buruh

Australia merupakan negara yang menganut sistem dwi partai, yang terdiri dari Partai Buruh (*Labour Party*) dan Partai Liberal (*liberal Party*), sedangkan partai-partai kecil lainnya merupakan pecahan dari kedua partai tersebut.

Partai buruh merupakan partai tertua di Australia, partai ini berkembang dari pemogokan masa para buruh yang gagal pada permulaan 1890an.²⁸ Partai Buruh awalnya dibentuk oleh kaum serikat pekerja pelabuhan yang ingin menyampaikan kepentingan mereka untuk diperjuangkan dalam proses politik. Dari sudut sosio-historis, kalangan kelas pekerja pelabuhan dan wol saat itu terasingkan dari kehidupan politik, hal inilah yang kemudian membangkitkan rasa senasib-sepenanggungan dan kesadaran untuk bersatu. Serikat buruh tersebut kemudian menyadari bahwa mereka memerlukan wakil-wakil politik di parlemen bila mereka ingin memperjuangkan kepentingan mereka. Partai Buruh memiliki hubungan institusionalis yang kuat dengan gerakan buruh, dan dianggap mewakili kelas pekerja. Mereka menghendaki adanya sebuah cara pandang yang eligater dan kebebasan yang akhirnya dijadikan sebagai ideologi Partai Buruh Australia yaitu sosial-demokrasi. Tujuan sosial-demokrasi yang dimaksud Partai Buruh Australia adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum dalam bidang perindustrian, produksi, distribusi yang dilakukan untuk menghapuskan penindasan namun tetap dalam prinsip demokrasi parlementer. Partai Buruh Australia mewakili kepentingan sosial-demokrat yang menekankan pada perubahan cara pandang industrialisasi, dan lebih terbuka terhadap perkembangan isu seperti lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejak didirikannya sampai sekarang, partai buruh kerap dilanda perpecahan intern. Pertama, Pada tahun 1916 sehubungan dengan kebijakan wajib militer yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Whiliam Morris hughes. Kebijakan ini menurut Hughes sangat diperlukan untuk menjaga kontribusi pasukan Australia dalam perang dunia pertama, namun kebijakan Perdana Menteri ini mendapat tantangan karena

²⁸ *ibid*

kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan partai, serta dianggap menyinggung perasaan orang-orang Irlandia dalam partai. Sehingga kelompok pro wajib militer dipecat dari partai, sehingga mereka bergabung dengan kelompok oposisi non buruh. Kemudian Hughes dan kelompok oposisi berhasil menjatuhkan pemerintahan Buruh untuk kemudian membentuk pemerintah baru di bawah pimpinan Hughes pada tahun 1917.²⁹ Perpecahan ini membawa Partai Buruh menjadi oposisi sampai tahun 1929.³⁰

Perpecahan kedua terjadi pada tahun 1929,³¹ ketika James H. Schullin dari partai Buruh menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, periode pemerintahan Schullin berlangsung singkat, karena terjadi perpecahan dalam partai. Perpecahan ini terjadi ketika PM Schullin merancang kebijakan ekonomi untuk menghadapi krisis ekonomi di Australia. Di bawah tekanan Senat dan para banker konservatif, Schullin mengambil kebijakan yang dikenal sebagai *Premiers Plan*.³² Sebagai aksi ketidakpuasan dari kebijakan tersebut, kelompok menentang dari Partai Buruh yang notabene berorientasi kiri yang diketuai oleh J.A Lyons dan atas dukungan Jack Lang sebagai Perdana Menteri New South Wales, kemudian bergabung dengan oposisi non Buruh untuk memimpin sebuah partai baru yang bernama *United Australian Party* (UAP). Perpecahan ini membuat pemerintahan Schulin jatuh dan gagal memenangkan pemilu pada 1931, sehingga Jack Lyon bersama UAP memimpin pemerintahan selama dua periode (1931-1937).³³

Partai Buruh kemudian dipimpin oleh John Curtin. Dalam masa pimpinan Curtin, Partai buruh melaksanakan kebijakan-kebijakan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan sosial, pembangunan, industri sekunder, dan nasionalisaasi perbankan.

29 Richard H. Chauvel, *Politics Down Under : Kehidupan Politik Dalam Negeri Australia*, dalam jurnal ilmu politik 6.

30 *ibid*

31 *ibid*

32 Kebijakan ini dipandang sangat merugikan bagi kepentingan negara bagian, sebab kebijakan ini mengharuskan setiap negara bagian untuk mengurangi anggaran belanjanya sebagai cara untuk menyeimbangkan budget.

33 Richard H. Chauvel, *Politics Down Under : Kehidupan Politik Dalam Negeri Australia*, dalam jurnal ilmu politik 6.

Pada tahun 1967 kepemimpinan Partai Buruh digantikan oleh Gough Whitlam,³⁴ Kepemimpinannya telah menandai adanya pergeseran para pejabat serikat buruh pada masa lalu digantikan oleh pilitisi professional yang berpendidikan. Setelah gagal dalam memenangkan pemilu 1969,³⁵ Whitlam mengadakan restrukturisasi partai dengan jalan memperbaiki struktur organisasi dan menjadikan Partai Buruh memiliki karakter yang bersifat nasional. Setelah berada dalam kedudukan sebagai oposisi sebagai 23 tahun, Partai Buruh kemudian memenangkan pemilu 1972.³⁶ Namun pada tahun 1975³⁷ Gubernur Jendral Sir John Kerr “memberhentikan” Whitlam karena dianggap tidak dapat mengatasi krisis politik yang terjadi di Australia saat itu. sehingga pada November 1975 Perdana Menteri Australia digantikan oleh John Malcolm yang saat itu berstatus Perdana menteri sementara.³⁸ Malcolm kemudian memenangkan pemilu pada Desember 1975 dan kembali memenangkan 2 pemilu berikutnya pada 1977 dan 1980 sebelum akhirnya dikalahkan oleh Bob Hawke pada 1983.³⁹ PM Hawke memegang jabatan sampai tahun 1991, Pemerintahan di bawah Hawke meluncurkan beberapa kebijakan seperti reformasi pada mikroekonomi Australia seperti privatisasi beberapa perusahaan yang dimiliki pemerintah, seperti Commonwealth Bank, Australian Airlines, dan Qantas.⁴⁰

Pemerintahan kemudian kembali diambil alih oleh Partai Buruh di bawah Paul Keating sampai pada Maret 1996. Namun, untuk pertama kalinya selama kurun waktu 50 tahun, partai koalisi dalam pemilu Australia berhasil mengalahkan Partai Buruh, dengan kemenangan mutlak lebih dari 45 kursi di parlemen. Ada empat faktor yang

34 Amxulian Rifai, “*Pengantar Konstitusi Australia*”, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 23

35 *Opcit.* Amxulian Rifai hal 19

36 *ibid*

37 *ibid*

38 *ibid*

39 *ibid*

40 Article WN. Politik Australia. Dalam “ http://article.wn.com/view/2013/11/24/Politik_ausignares/ Diterbitkan pada 24 November 2013.(diakses pada 14 Januari 2014)

diperkirakan menjadi penyebab kekalahan Partai Buruh yaitu, ⁴¹ *Pertama* ketidakdekatan Keating dengan pers Australia sehingga Pers cenderung memberikan berita negatif tentang dirinya dari pada hal-hal positif. Pada pemilu 1993, pers Australia mengatakan bahwa Keating akan kalah dalam pemilu tersebut, namun kenyataannya, Keating berhasil menang. Sejak itu, hubungan antara Keating dan pers dinilai kurang baik. *Kedua* terlalu lama Partai Buruh Berkuasa, sehingga masyarakat walaupun mengetahui Partai Koalisi tidak memiliki program yang spesifik, bahkan sebaliknya kurang menguntungkan masyarakat Australia seperti pegawai negeri yang akan dirasionalisasi, perubahan hubungan dengan serikat pekerja, dan golongan masyarakat berpendapatan rendah yang tidak akan lagi menikmati pelayanan kesehatan sebagi di masa pemerintahan buruh, namun secara *irrational* mereka memilih partai koalisis. *Ketiga* perubahan radikal di masa pemerintahan Keating telah membangkitkan kembali konservatisme masyarakat. Mereka menilai, adalah lebih baik memilih John Howard dari partai koalisi, yang tidak akan melakukan perubahan-perubahan berarti sehingga tidak mengancam ketenangan hidup mereka. *Keempat* tidak berkuasanya Partai Buruh di beberapa negara bagian yang penting, khususnya di pantai timur Australia seperti Queensland, New South Wales dan Victoria, jika Partai Buruh bisa mengambil alih kursi pemerintahan di negara bagian tersebut, amak akan meningkatkan popularitas partai dalam pemilu berikutnya.

Kemanangan Partai Liberal kemudian membawa John Howard menjadi Perdana Menteri Australia selama tahun 1996-2007. Pada pemilu 2007, kekuasaan kembali diraih oleh Partai Buruh yang membawa Kevin Rudd memerintah hingga tahun 2010, dan kemudian digantikan oleh Julia Gillard yang juga menjabat sebagai perdana Menteri wanita pertama di Australia.

Pada masa pemerintah Buruh berkuasa, kepentingan nasional Australia terutama dalam politik luar luar negerinya ialah mempertahankan keamanan Australia, meningkatkan kemakmuran rakyat Australia terutama kelas menengah, dan

41 Lihat Ikrar Nusa Bakti “Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan”. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Hal: 141-142

meningkatkan citra Australia di mata dunia internasional.⁴² Hal ini diimplementasikan melalui kerjasama ekonomi, politik, dan pertahanan dengan negara-negara Asia, serta dengan bantuan luar negeri Australia untuk meningkatkan Citra Australia.

Pemerintah Buruh Australia di bawah Bob Hawke dan Paul Keating telah meletakkan dasar politik luar negeri Australia terhadap negara-negara Asia⁴³ yaitu melalui kerjasama ekonomi, politik dan sosial. Pendekatan ini berbeda dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Australia sebelum 1983 yang lebih menekankan masalah politik dan keamanan. Selain itu, jika di masa lalu Australia “mencari” kemandirian dari Asia, khususnya dengan berpayung pada Inggris (sebelum Perang Dunia II) dan pada Amerika Serikat (setelah Perang dunia II), maka sejak 1984 Australia berupaya “mencari kemandirian di dalam Asia”⁴⁴ yaitu dengan mengintegrasikan Australia dengan negara-negara asia serta membentuk langkah-langkah saling percaya (*Confidence Building Measure*)

Di bidang ekonomi, Australia merupakan pencetus terbentuknya kerjasama ekonomi Asia pasifik (APEC) pada 1989 dan berupaya untuk mengintegrasikan ekonomi Australia dengan Asia.⁴⁵ Walaupun terdapat kritik dari para Pengusaha di Australia bahwa investasi Australia ke negara-negara asia serta ekspor produk berteknologi tinggi ke Asia seperti Singapura dan Filipina kalah dengan negara-negara Eropa, namun pemerintah Buruh tetap berupaya keras untuk meningkatkan perdagangan dan investasi ke Asia.

Di bidang politik dan pertahanan, Australia aktif menjaga stabilitas regional di Asia melalui kerjasama regional di bidang pertahanan dengan negara-negara anggota

42 Ikrar Nusa bakti “Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan” 1996
PT Pustaka jaya: Jakarta hal 145

43 *ibid*

44 *ibid*

45 *ibid*

ASEAN⁴⁶ yaitu melalui *Forum Regional ASEAN (ARF)*. Pada dasarnya hal ini dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap Australia. karena itu, Australia perlu menjaga hubungan yang baik dengan Asia. Selain itu, kebijakan formal antara Australia dengan negara Asia sangat ditunjang oleh pendekatan hubungan interpersonal antara PM Paul Keating dengan para kepala pemerintahan negara Asia dan juga hubungan pribadi Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans dengan menteri Luar Negeri negara-negara Asia.⁴⁷ Namun tantangan yang dihadapi Australia dalam kaitannya dengan keamanan regional di Asia Pasifik adalah ketikpastian tentang peranan Cina di masa depan. Untuk itu, Australia harus melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dan kemanan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tentang peranan Cina bagi Australia ini, kemudian tertuang dalam buku Putih Australia tahun 2009 dan 2012.

2.3 Sistem ekonomi Australia

Australia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern. Sistem ekonomi ini dalam pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar yang bergantung pada besarnya permintaan dan penawaran sehingga pemerintah tidak terlalu turut campur dalam pasar. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain itu dalam sistem ini, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan, diantaranya undang-undang anti monopoli (*Antitrust Law*). Nasib pekerja juga sudah mulai diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapitalis modern tidak semua aset produktif boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak,

⁴⁶ *Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)* merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan asia Tenggara. Anggota ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

⁴⁷ *Op.Cit* .Ikrar Nusa bakti. hal 6

pembatasannya dilakukan berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan yang mencolok, maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.

Semenjak terjadinya resesi ekonomi di Australia pada 1996, hal tersebut menyebabkan angka pengangguran di Australia semakin meningkat dan lemahnya perekonomian. Melihat kondisi tersebut, Paul Keating yang menjabat sebagai Perdana Menteri saat itu, mengambil kebijakan untuk membuka perekonomian Australia. Ia mengubah perekonomian Australia dengan sistem ekonomi terbuka. Paul Keating mengizinkan negara lain untuk mengadakan investasi di Australia, dengan memberikan kebebasan kebijakan investasi asing, kecuali di beberapa sektor yang masih dibatasi seperti televisi dan bank. Paul Keating juga mempelajari pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik dan menyatakan bahwa Australia saat itu Australia telah ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi dengan negara Asia Utara, Korea, Taiwan dan Cina. Untuk itu, Paul Keating kemudian berusaha bangkit dengan berpedoman bahwa keterlambatan tersebut harus segera diatasi, strateginya adalah membuka pasar Australia seluas mungkin, dengan menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Eropa, Amerika serta mulai membuka hubungan dagang dengan beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik.

Sebagai bagian dari agenda reformasi yang ambisius, Australia secara progresif telah merombak atau memangkas banyak tarif proteksionisnya. Kebijakan proteksi atau pembatasan dalam beberapa manufaktur tersebut diturunkan secara bertahap pada tahun 1988 sampai 1997, sehingga pada 1997 manufakturing umunya hanya akan di lindungi sebesar 5% saja.⁴⁸ Sedangkan pada sektor lain, seperti mobil, pakaian, tekstil, dan sepatu juga diturunkan hingga 15%.⁴⁹ Selain itu, Perubahan dan penyerdehanaan sistem perpajakan di Australia telah memangkas biaya usaha secara

48PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksikan di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

49 Radio Australia. Proteksi di india ketat kata Australia . Dalam <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2003-09-17/proteksi-di-india-ketat-kata-australia/805216> Diterbitkan pada 17 September 2003 (diakses pada 12 maret 2014)

nyata, khususnya bagi para eksportir. Pajak barang dan jasa (GST) ditetapkan 10% dan berlaku untuk hampir semua barang dan jasa. Australia terus membangun fondasi ekonomi yang kuat dalam negeri dan semakin meningkat akses di pasar internasional, melalui basis ekspor yang berdaya saing dan inovatif dan tekad kuat terhadap liberalisasi perdagangan dunia.⁵⁰

2.4 Buku Putih Australia

Buku Putih adalah sebuah laporan resmi yang dikeluarkan oleh kepala pemerintahan suatu negara, untuk menguraikan suatu kebijakan atau memberikan penjelasan resmi mengenai suatu masalah atau keputusan. Di Australia buku putih atau “Australia White Paper” di keluarkan oleh seorang Perdana Menteri. Keputusan pemerintah Australia menetapkan konversi langsung mata uang Dollar Australia dengan Renminbi Cina keputusan tersebut merupakan upaya Australia dalam mengintegrasikan hubungan kerjasama dengan Asia sesuai kebijakan Julia Gillard yang dituangkan dalam “buku putih” Australia tahun 2012. Sebelum penulis menjelaskan tentang “buku putih” tahun 2012, sebagai perbandingan, penulis akan menjelaskan secara singkat “buku putih” Australia sebelumnya pada tahun 2009. Adanya perbedaan persepsi Australia terhadap Cina dalam “white paper” tahun 2009 dan 2012 kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab pembahasan.

2.4.1 Buku Putih Australia 2009

Buku Putih Australia tahun 2009 secara resmi di keluarkan oleh Perdana Menteri Australia Kevin Rudd .“Buku putih” yang berjudul “*Defending Australia In*

50 Indonesia Embassy. Ekonomi global. Dalam http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/ekonomi_global.html . Diterbitkan pada 17 Maret 2010 (diakses pada 13 Maret 2014)

The Asia Pacific Century: Force 2030 “terdiri dari 140 halaman dan terbagi atas 18 bab. Adapula ringkasan isi dari “buku putih” Australia tahun 2009 yaitu: ⁵¹

Bab I *The Government’s Approach To Defence Planning* menjelaskan tentang latar belakang Buku Putih Pertahanan 2009 beserta segenap faktor yang terkait di dalamnya. Bab II *Defence and National Security* mengupas tentang tentang konflik dalam negara, ancaman yang ditimbulkan oleh aktor non negara serta menghadapi bencana alam dan isu keamanan internal Australia. Bab III *Managing Strategic Risk In Defence Planning* menguraikan panjang lebar tentang perencanaan pembangunan kekuatan pertahanan Australia, yang menuntut kompromi antara *ends* dengan *means* untuk menghadapi *risk* yang muncul dari situasi lingkungan keamanan.

Bab IV *Australia’s Strategic Outlook* mengulas tentang situasi lingkungan keamanan dari perspektif kepentingan nasional Australia. Bab V *Australia’s Strategic Interests* mendeskripsikan kepentingan strategis Australia di tingkat regional dan global. Bab VI *Australia’s Defence Policy* berisi uraian menyangkut kebijakan pertahanan Australia. Bab VII *Principal Tasks For The ADF* membahas tentang tugas-tugas pokok *Australian Defence Force* saat ini dan ke depan, baik di dalam negeri maupun untuk penugasan internasional. Bab VIII *The Future Development of ADF* menceritakan secara panjang lebar tentang pembangunan kekuatan *Australian Defence Force* di masa depan merupakan salah satu bab inti dalam *Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030*.

Bab IX *Capability Priorities For Force 2030* berfokus pada kemampuan yang harus dimiliki oleh *Australian Defence Force* selaku kekuatan pertahanan pada tahun 2030. Bab X *How Prepared Does The ADF Need To Be*. Bahasannya tentang kesiapan *Australian Defence Force* untuk mengamankan Australia dan kepentingannya. Bab XI *Alliances And International Defence Relationships* berisi

51 Department of Defence Australia .Australia white paper 2009. Dalam http://www.defence.gov.au/whitepaper2009/docs/defence_white_paper_2009.pdf . Diterbitkan pada Agustus 2009. (diakses pada 10 januari 2014)

tentang aliansi dan hubungan pertahanan Australia dengan berbagai negara di beberapa kawasan di dunia.

Bab XII *Defence Intelligence* difokuskan pada peran intelijen pertahanan untuk merespon lingkungan keamanan yang berpengaruh terhadap upaya mempertahankan Australia dan kepentingannya. Bab XIII *Defence Management And Reform* muatannya bercerita tentang manajemen pertahanan Australia dan reformasi yang dilaksanakan untuk merespon tantangan yang berkembang. Bab XIV *People In Defence* isinya menyangkut pembinaan sumber daya manusia di dalam *Australia Defence Force*, baik perekrutan, pelibatan personel kontraktor maupun aspek kesejahteraan personel.

Bab XV *Supporting The ADF* cakupannya tentang peran unsur-unsur pendukung dalam *Australian Defence Force*, seperti *Information and Communication Technology*, sarana dan prasarana fasilitas pangkalan dan logistik gabungan. Bab XVI *Procurement, Sustainment And Industry Support* ruang lingkupnya tentang pengadaan, pemeliharaan, kebijakan tentang industri pertahanan dan kerjasama internasional dalam rangka mendukung pengadaan sistem senjata bagi *Australian Defence Force*. Bab XVII *Defence Science And Technology* mendeskripsikan tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung pembangunan kekuatan pertahanan Australia. Bab XIX *Funding Defence In The Future* berisi dukungan pendanaan jangka panjang pemerintah Australia guna mewujudkan semua program pembangunan kekuatan yang tercantum dalam Buku Putih 2009.

Secara keseluruhan, melihat kebijakan pemerintah dalam “buku putih” Australia 2009, bawah ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah Australia. Menyangkut kawasan Asia Pasifik, selain masih adanya sejumlah konflik antar negara yang akan mempengaruhi kepentingan strategis Australia, perhatian juga diberikan pada kebangkitan Cina.

Hal ini tertulis dalam bab IV “buku Putih” Australia sebagai berikut:⁵²

52 *ibid*

“ Barring major setbacks, China by 2030 will become a major driver of economic activity both in the region and globally, and will have strategic influence beyond East Asia. By some measures, China has the potential to overtake the United States as the world's largest economy around 2020. However, economic strength is also a function of trade, aid and financial flows, and by those market-exchange based measures, the US economy is likely to remain paramount. But china will also be the strongest Asian military power, by a considerable margin. Its military modernisation will be increasingly characterised by the development of power projection capabilities. A major power of China's stature can be expected to develop a globally significant military capability befitting its size. But the pace, scope and structure of China's military modernisation have the potential to give its neighbours cause for concern if not carefully explained, and if China does not reach out to others to build confidence regarding its military plans”.

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa Australia memprediksikan pertumbuhan ekonomi Cina yang semakin meningkat tiap tahunnya, diperkirakan akan membawa Cina pada 2030 menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi baik di kawasan Asia pasifik maupun dunia. China memiliki potensi untuk mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai perekonomian terbesar di dunia sekitar tahun 2020. Selain itu dari segi pertahanan, modernisasi militer Cina diperkirakan akan menjadi ancaman bagi Australia, sehingga Australia harus lebih berhati-hati terhadap kondisi tersebut. Kondisi inilah yang kemudian membuat Australia lebih berhati-hati dengan Cina, sehingga Australia kemudian memilih untuk lebih menginterasikan hubungan ekonomi dan pertahannya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan Amerika.

2.4.2 Buku Putih Australia 2012

“Buku putih” setebal 320 halaman ini, secara resmi dikeluarkan oleh PM Julia Gillard pada Oktober 2012. Di keluarkanya buku putih Australia ini dengan melihat perkembangan ekonomi Asia yang terus meningkat, akan memberi “*benefit*” secara ekonomis bagi Australia, stabilitas dan kemakmuran wilayah Australia akan tergantung dari bagaimana hubungan antara negara dengan kekuatan ekonomi

tersebsar dunia, yaitu RRC, India, Jepang dan Amerika Serikat. Persaingan antara negara tidak dapat dihindari selagi tatanan strategis Asia berubah. Setiap negara memerlukan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi maka dari itu, hubungan saling ketergantungan serta hubungan bilateral yang semakin tumbuh merupakan faktor-faktor kuat untuk menstabilkan keadaan. Hal ini sesuai dalam pembukaan Pasal I “buku putih” Australia:⁵³

“The transformation of the Asian region into the economic powerhouse of the world stoppable, it is gathering pace. In this century, the region in which we live will become home to most of the world’s middle class. Our region will be the world’s largest producer of goods and services and the largest consumer of them. Our nation also has the strength that comes from a long history of engagement with countries in Asia. Australia’s relationships in our region are strong and robust, including with Asian nations like China, Japan, India, Indonesia and the Republic of Korea (South Korea). But in this Asian century we must enter a new phase of deeper and broader engagement”.

Australia white paper 2012 terdiri dari 8 Pasal . Pasal I sampai IV dari “White Paper” ini menerangkan bangkitnya Asia yang luar biasa selama beberapa dasawarsa dan kemungkinan akan terus meningkat hingga tahun 2025 Pasal-pasal ini membicarakan kedudukan Australia di Asia dan masa depan Australia sampai 2025.

Bab V sampai IX memaparkan seperangkat tujuan nasional dan cara-cara untuk mewujudkan tujuan tersebut sampai tahun 2025 .

“White Paper 2012” menjelaskan terdapat dua puluh lima tujuan nasional Australia yang ingin dicapai di tahun 2025, sebagai upaya untuk menghadapi abad Asia. Tujuan-tujuan tersebut terperinci dalam “ White Paper“ 2012 serta berbagai kebijakan yang harus di laksanakan Australia. Mulai dari Pertahanan, Sosial, Pendidikan, sektor pangan dan pertanian, maslah lingkungan sampai pada perekonomian. Dalam skripsi ini, penulis akan memaparkan isi dari “white paper” 2012 yang berfokus mengenai beberapa kebijakan Julia Gillard terhadap Cina sebagai berikut :

53 Lihat Ministry of Australia. Australia White Paper 2012. Dalam <http://www.asiaeducation.edu.au/verve/resources/australia-in-the-asian-century-white-paper.pdf> Diterbitkan pada 10 Oktober 2012 (diakses pada 15 Januari 2014)

Beroperasi di dalam dan berhubungan dengan pasaran Asia (Pasal 8)**Tujuan pemerintah :**

- a. Hubungan perdagangan Australia dengan Asia akan mencapai sekurang-kurangnya sepertiga dari GDP (produk domestik bruto) pada 2025.
- b. Australia akan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian yang menyeluruh di seluruh wilayah yang akan banyak mengurangi biaya melakukan kegiatan usaha di pasar Asia dengan menurunkan rintangan-rintangan perdagangan dan investasi, lebih menyelaraskan peraturan ekonomi dan pengaturan cara kerja korporat, dan mempererat hubungan infrastruktur.
- c. Bidang usaha di Australia dan wilayah ini akan mempunyai hubungan kerja yang dikembangkan dengan baik berdasarkan pemahaman yang baik mengenai institusi hukum masing-masing, praktek perdagangan dan standard pengaturan korporat.

Kebijakan di Australia

- a. Bekerja untuk mengurangi rintangan dalam negeri Australia tentang kegiatan usaha lintas negara, investasi dan perpindahan pekerja terampil, dengan mempertimbangkan pengaturan yang berlaku di negara lain di wilayah Australia.
- b. Mempermudah datangnya pengunjung ke Australia, melalui visa dengan jangka waktu yang lebih panjang dan izin masuk berulang kali dan lebih banyak penggunaan visa *online* (melalui internet). Untuk mendorong lebih banyak wisatawan dari pasar-pasar berkembang, terutama dari Cina, pemerintah akan bertumpu pada proses percobaan visa yang disederhanakan untuk wisatawan Cina independen dan terus mempromosikan Australia sebagai tempat tujuan terpilih di wilayah ini.

- c. Terus menyambut investasi asing di Australia dan mendorong Australia sebagai tempat tujuan investasi, termasuk dengan berhubungan dengan penanam modal utama dan negara-negara penanam modal.
- d. Terus meningkatkan transparansi proses pemeriksaan investasi asing di Australia.

Kebijakan Luar Negeri

- a. Bekerja ke arah perjanjian perdagangan bebas di wilayah Asia-Pasifik dengan mendorong liberalisasi yang kompetitif dalam perjanjian-perjanjian regional, melalui partisipasi terusmenerus dalam perbincangan untuk *Trans-Pacific Partnership Agreement*, dan berpartisipasi dalam perbincangan *Regional Comprehensive Economic Partnership*
- b. Mendorong ketentuan tentang asal barang dalam perjanjian perdagangan yang meringankan beban pemenuhan persyaratan usaha dan mempermudah perdagangan.
- c. Menilai faedah dari bergabung dengan *Pacific Alliance of Chile, Colombia, Mexico and Peru* sebagai bagian dari usaha untuk menempatkan Australia sebagai tongkat penghubung antara Amerika Latin dan Asia.
- d. Bekerja untuk meningkatkan akses bagi penanaman modal Australia di pasar Asia.
- e. Keuangan yang stabil, efisien dan terbuka; misalnya, melalui kerjasama lebih lanjut ke arah pembangunan perdagangan langsung antara mata uang Dolar Australia dan Renminbi Cina.

Membangun keamanan yang berkelanjutan di Australia (Pasal VIII)**Tujuan Pemerintah :**

Australia akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan menyeluruh, terutama dengan Cina, India, Indonesia, Jepang dan Korea Selatan.

Kebijakan pemerintah Australia:

- a. Mendukung pengaturan kerja sama antara kekuatan-kekuatan utama dunia di wilayah Cina, Jepang, Indonesia, India, dan Amerika Serikat
- b. Mendukung partisipasi Cina dalam pengembangan strategis, politik dan ekonomi di Australia.
- c. Bekerja demi stabilitas ekonomi dunia dan hubungan kekuatan-kekuatan utama yang saling membantu melalui G20, yang akan dituanrumahi oleh Australia pada tahun 2014, dengan pokok pikiran yang jelas pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi global dan membuat peraturan dan institusi dunia efektif dan relevan dalam masa perubahan ekonomi ini.

BAB 3. PERDAGANGAN AUSTRALIA DENGAN CINA DAN UPAYA AUSTRALIA UNTUK MENCAPAI KONVERSI LANGSUNG MATA UANG DOLAR AUSTRALIA DENGAN RENMINBI

Sebagai salah satu negara maju di dunia, kegiatan ekonomi Australia mengandalkan industri pertambangan, pertanian dan peternakan. Kegiatan ekonomi Australia dalam industri pertambangan meliputi pertambangan emas, bijih besi, pertambangan batu bara dan gas alam. Sedangkan dalam bidang pertanian peternakan, Australia mengandalkan pertanian gandum, peternakan sapi, domba, dan ayam. Australia bahkan merupakan negara yang memproduksi wool dan susu sapi terbesar di dunia yang diekspor ke berbagai negara.

Saat ini Australia termasuk negara dengan ekonomi yang kuat di dunia, dilihat berdasarkan peringkat dalam Indeks Kebebasan Ekonomi yang tercatat pada tahun 2010, negara Australia termasuk dalam posisi ke-13 dunia pada urutan ekonomi terbesar di dunia dan pasar saham Australia juga merupakan yang terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah Jepang. Berdasarkan Product Domestic Bruto (PDB)⁵⁴ Australia menempati posisi ke-9 terbesar di dunia bahkan lebih tinggi dibandingkan Britania Raya, Jerman, Perancis, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat.⁵⁵ Selain itu, pada tahun 2010 hingga 2013 Australia berhasil menempati

⁵⁴*ibid*

⁵⁵ Danar Widiyanta. Kebijakan Ekonomi Australia pada Pemerintahan Paul Keating. Dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Danar%20Widiyanta,%20M.Hum./Kebijakan%20Ekonomi%20Australia%20Masa%20Paul%20Keating.pdf> . Diterbitkan pada 10 agustus 2010(diakses pada 22 Januari 2014)

posisi pertama dalam “*Better Life Index*” yang diprakarsai oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Lewat indeks ini, OECD menyusun peringkat negara-negara maju sedunia berdasarkan tingkat pekerjaan, pendapatan, lingkungan hidup, serta kesehatan masyarakat.

Laju inflasi⁵⁶ merupakan parameter ekonomi untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara. Pada tahun 2010 inflasi di Australia sebesar 2,8%, pada tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu 3,0%, namun kembali menurun pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 2,2%.⁵⁷ Berdasarkan angka tersebut, dapat di simpulkan bahwa tingkat inflasi di Australia adalah rendah. Kondisi ekonomi tersebut semata-mata tidak membuat merasa “aman” seiring dengan perkembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik kawasan Asia yang dimotori oleh Cina. Perkembangan saat ini memperlihatkan Cina muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan politik yang sangat dominan dan berperan penting khususnya di kawasan Asia Pasifik. Fenomena tersebut menjadi faktor yang mendorong Australia untuk lebih meningkatkan perannya di kawasan Asia pasifik, seperti yang telah dirumuskan dalam “White Paper” tahun 2012.

3.1 Hubungan Ekonomi Australia dengan Asia

Sejak tahun 1970, Australia telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara di Asia, khususnya Asia Timur seperti Cina dan Korea Selatan, namun pada saat itu kerjasama ekonomi antara Australia dengan negara tersebut

56 Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

57 *Loc.Cit* Ministry of Train and Trade Australia hal : 1

belum terjalin erat seperti saat ini. Konsentrasi hubungan dagang Australia lebih tertuju pada negara Barat yaitu Amerika Serikat dan Eropa. Namun akibat pengaruh dari krisis finansial di Eropa dan Amerika pada pertengahan tahun 2007, menyebabkan jumlah ekspor barang Australia ke kedua negara tersebut semakin menurun. Sehingga, untuk mensiasati hal tersebut, Australia kemudian mulai melirik potensi di kawasan Asia Pasifik, yang dinilai semakin berkembang. Seperti yang ditunjukkan dalam data dibawah ini

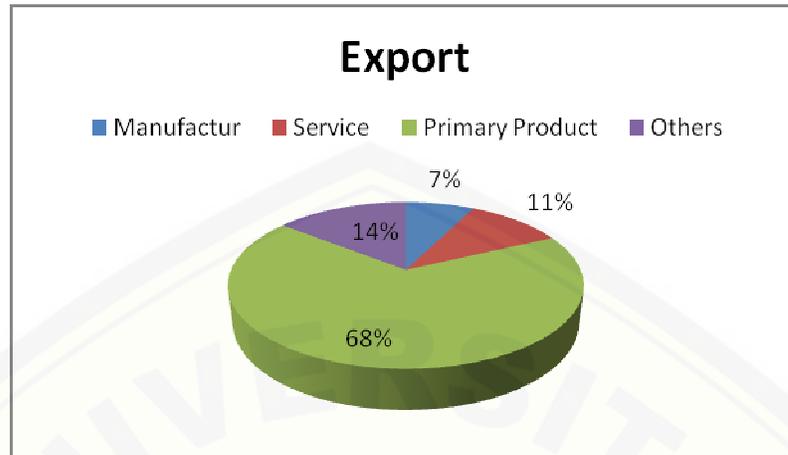
Tabel 3.1 Perdagangan Australia dengan Asia

No	Tahun	Ekspor	Impor
1	2007	\$55 Miliar	\$53,5 Miliar
2	2008	\$150 Miliar	\$75 Miliar
3	2009	\$70 Miliar	\$55 Miliar
4	2010	\$147 Miliar	\$57 Miliar
5	2011	\$157 Miliar	\$57 Miliar
6	2012	\$160 Miliar	\$60 Miliar

Data di olah dari: Australi's trade with Asia

Sumber: <http://www.dfat.gov.au/trade/>

Mengacu pada data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah ekspor barang dan jasa Australia ke Asia semakin meningkat sejak tahun 2007 hingga 2012. Semakin meningkatnya jumlah ekspor barang dan jasa Australia terhadap negara di kawasan Asia Pasifik, didukung pula oleh jumlah penduduk di kawasan tersebut yang besar, secara otomatis Asia merupakan pasar yang besar, tidak hanya untuk produk tetapi juga bagi industri jasa Australia. Data di atas juga menggambarkan bahwa, jumlah ekspor Australia ke Asia lebih besar di bandingkan dengan jumlah impor barang Australia dari Cina. Artinya, dalam rentan enam tahun Australia mengalami surplus perdagangan dengan Cina. berdasarkan adat sejak tahun 2010, adapula jenis barang dan jasa yang diekspor Australia ke Cina sebagai berikut:

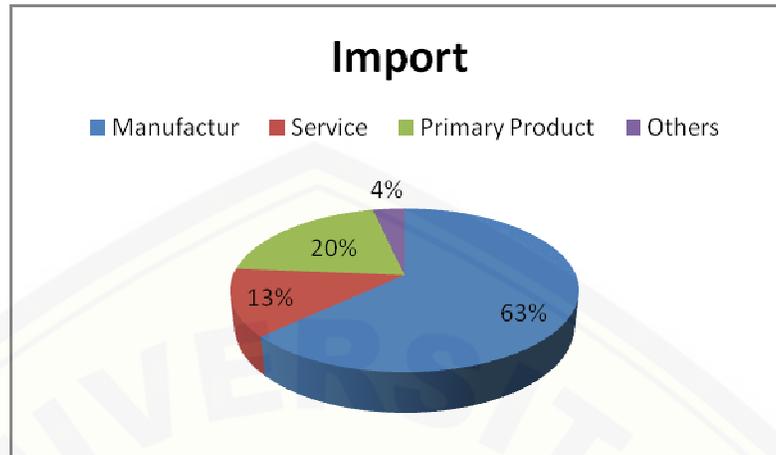


Gambar 3.1 Komoditi Ekspor Australia ke Asia

Data di olah dari: Australia's in Good n service

Sumber: <http://www.dfat.gov.au/trade/trade-and-economic-statistics.html>

Berdasarkan data tersebut, dapat di lihat bahwa 68% komoditi ekspor terbesar Australia ke negara-negara Asia adalah berupa sumber daya alam mentah (*Primary Product*), di mana *Primary Product* yang diekspor Australia tersebut sebagian besar berupa hasil tambang dan pertanian. Selain berupa hasil tambang dan pertanian, sekitar 14% barang yang diekspor Australia adalah jenis manufaktur yaitu sepatu kulit, tepung gandum dan dan serbuk kayu. Selain itu, 11% berupa servise atau layanan jasa, yaitu jasa pendidikan dan pariwisata. Namun, selain mengeksport barang dan jasa, Australia juga mengimpor beberapa jenis barag dan jasa yang di perlukan dalam negerinya dari negara-negara di Asia. Adapula komoditi ang diimporAustralia tersebut, seperti yang di gambarkan pada data di bawah ini:



Gambar 3.2 Komoditi Impor Australia dari Asia

Data di olah dari : Australia's in Good n service

Sumber: <http://www.dfat.gov.au/trade/trade-and-economic-statistics.html>

Merujuk pada data di atas, dapat di jelaskan bahwa jenis barang yang diimport Australia dari negara-negara di Asia yaitu barang manufaktur, dengan total sekitar 63%. Jenis manufaktur yang diimport Australia mayoritas berupa pakaian, mobil, kasur, bantal, dan komputer. Dalam hal ekspor dan impor barang tersebut, tentunya Australia menjalin kerjasama dengan beberapa negara di Asia. Berikut ini adalah lima negara utama yang menjadi rekan dagang Australia:

Tabel 3.2 Pasar Ekspor Australia

No	Negara	2010	2011	2012	World Total
1	China	\$64.101 Juta	\$77.103 juta	\$78.883 juta	26,3%
2	Jepang	\$45.650 Juta	\$52.366 juta	\$49.800 Juta	16,6%
3	Korea Selatan	\$22.337 Juta	\$24.989 juta	\$21,589 juta	7,2%
4	Singapura	\$7,431 Juta	\$9,520 Juta	\$10,252 Juta	3,4%
5	Taiwan	\$8,920 Juta	\$9,679 Juta	\$8,639 Juta	2,9%

Data di olah dari: Australia's Ekspor Goods and Service (A\$ Million)

Sumber: <http://www.dfat.gov.au/trade/>

Berdasarkan data pada gambar diatas dapat dilihat bahwa, dari tahun 2010 sampai tahun 2012 Cina merupakan negara tujuan ekspor Australia. Jumlah ekspor Australia ke Cina dalam kurun waktu tiga tahun, kian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sekitar 26,3% ekspor Australia ditujukan ke Cina, di mana komoditas ekspor Australia ke Cina yang terbesar adalah berupa barang tambang yaitu emas, batu bara, bijih besi, dan minyak mentah.

Sebagai negara industri, Australia juga membutuhkan berbagai sumber daya alam mentah dan pangan yang tidak dapat dipenuhi sendiri dalam negeri. Untuk itu, Australia mengimpor beberapa komoditi yang dibutuhkan Australia dari Asia. Berikut adalah daftar di negara Asia menjadi pasar impor Australia dari tahun 2010 sampai 2012.

Tabel 3.3 Impor Barang dan Jasa Australia dengan Cina

No	Negara	2010	2011	2012	World Total
1	Cina	\$40,910 Juta	\$43,929 Juta	\$46,335 Juta	14,6%
2	Jepang	\$20,394 Juta	\$20,118 Juta	\$21,302 Juta	6,7%
3	Singapura	\$14,165 Juta	\$18,157 Juta	\$18,826 Juta	6,0%
4	Thailand	\$12,955 juta	\$10,698 juta	\$12,653 Juta	4,0%
5	Malaysia	\$10,239 Juta	\$9,877 Juta	\$10,913 Juta	3,4 %

Data Di olah dari : Australia's Impor of Goods and Service with Asia

Sumber: <http://www.dfat.gov.au/trade/>

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa mayoritas barang-barang yang diimpor Australia adalah berasal dari Cina. Barang-barang yang diimpor Australia dari Cina berupa barang manufaktur seperti alat permainan bayi, kasur, bantal, baju, dan peralatan olahraga . Sehingga merujuk pada kedua tabel di atas, dapat di lihat bahwa Cina merupakan pasar utama Australia, berdasarkan arus ekspor dan impor barang Australia dengan Cina.

3.2 Perdagangan Australia dengan Cina

Sejak tahun 2008, kerjasama arus perdagangan antara Australia dan Cina terus mengalami peningkatan, sehingga semakin mengintegrasikan hubungan ekonomi kedua negara. Dalam data di bawah ini, dapat dilihat perkembangan arus ekspor impor Australia dengan Cina.

Tabel 3.5 Jumlah Ekspor dan Impor Barang Australia dengan Cina

No	Tahun	Jumlah ekspor Australia-Cina	Jumlah Impor Cina-Australia
1	2008	\$40.000 juta	\$25.000 juta
2	2009	\$42.000 juta	\$26.000 juta
3	2010	\$63.000 juta	\$24.000 juta
4	2011	\$67.000 juta	\$24,010 juta
5	2012	\$42,070 juta	\$25.000 juta
6	2013	\$45,050 juta	\$25.000 juta

Data di olah dari : Australia's Merchandise trade with China

Sumber: <http://www.dfat.gov.au/geo/fs/chin.pdf>

Merujuk pada data tabel tersebut, dilihat bahwa selama 6 tahun terakhir jumlah ekspor barang Australia ke Cina semakin mengalami peningkatan. Adapula komoditi yang diekspor Australia ke Cina yaitu bijih besi dengan jumlah ekspor sebesar \$6.809 Juta, batu bara sebesar \$7.506 juta, emas sebesar \$5.974 juta, dan minyak mentah dengan jumlah ekspor \$1.957 juta.⁵⁸

Seain itu berdasarkan data tersebut, perdagangan Australia ke Cina sejak tahun 2008 hingga 2013 selalu mengalami surplus, yang di tandai dengan jumlah ekspor barang Australia ke Cina lebih besar di bandingkan dengan jumlah impor barang Australia dari Cina. Beberapa komoditi yang diimpor Australia dari Cina berupa peralatan telekomunikasi, baju, perangkat komputer, berbagai furniture, kasur dan bantal.

⁵⁸ Ministry of Trade and Trade Australia. China. dalam www.dfat.gov.au/geo/fs/chin.pdf . diterbitkan pada 15 Oktober 2012 (di akses pada 5 Maret 2014)

3.3 Valuta Asing dan Pasar Valuta Asing

Valuta asing dan pasar valuta asing merupakan faktor utama dalam hubungan transaksi perdagangan antar negara. “Valuta asing, dalam referensi keuangan internasional disebut juga *foreign exchange* atau *foreign currency* adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank sentral.⁵⁹

Dalam keadaan tanpa adanya intervensi pemerintah, besarnya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya biasanya ditentukan oleh keadaan perekonomian suatu negara. *Foreign exchange market* ini tidak tetap, melainkan selalu berubah mengikuti penawaran dan permintaan. Sementara itu, pasar valas dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem di mana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan dan penawaran.⁶⁰

Sementara Levi, Maurice dalam bukunya “*International Finance*” menjelaskan bahwa peran valas yang terwujud dalam pertukaran mata uang dapat bervariasi di pasar valas internasional. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan nilai tukar yang rasional antara mata uang yang diperdagangkan. Nilai uang yang terbentuk akan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor teknikal, fundamental, psikologis, dan lain-lain yang terakomodasi dalam periode tertentu. Ketiga faktor tersebut berimplikasi pada suatu kondisi nilai tukar yang cenderung fluktuatif dan penuh ketidakpastian dalam suatu perekonomian internasional.⁶¹

⁵⁹Tajul Khalwaty. (2000). *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hal. 23.

⁶⁰*ibid*

⁶¹ *Ibid*

3.4 Kurs

Kurs adalah jumlah satuan atau unit dari mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh atau membeli satu unit atau satuan jenis mata uang lainnya.⁶² secara singkat bahwa kurs adalah nilai suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Misalnya nilai mata uang RMB terhadap Dolar AS. Pemerintah umumnya memiliki kecenderungan untuk mengambil peran dalam penentuan kurs agar sampai pada tingkat yang kondusif bagi dunia usaha. Kurs khususnya nilainya terhadap Dolar AS, sangat berkaitan erat dan mempengaruhi arus barang dan jasa serta modal dari dalam dan keluar negara bersangkutan.

3.5 Upaya-Upaya Australia Untuk Mencapai Kesepakatan Konversi Langsung Dolar Australia dengan Renminbi

Rencana pemerintah Australia untuk bekerjasama dalam konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi Cina, telah tertulis dalam “*Australian White Paper*” 2012. Sebelum tercapainya kesepakatan mengenai konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi, pada tahap awal telah tercapai kesepakatan antara Bank sentral Australia (*Reserve Bank of Australia*) dan bank sentral Cina (*People's Bank of China*) yang menandatangani sebuah lini swap mata uang⁶³ sebesar 30 miliar Dolar Australia atau setara dengan 30,1 miliar Dolar AS, pada Maret 2012. Hal ini dilakukan pemerintah Australia untuk mendukung likuiditas perdagangan dalam Yuan.

⁶²Sawaldjo Puspoprano. (2004), *Manajemen Bisnis: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit PPM, hal. 212

⁶³*Currency Swap* atau sering disebut Swap adalah suatu transaksi atau kontrak untuk membeli atau menjual valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang, dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan counterparty yang sama. Transaksi swap dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun.

Menindak lanjut hal tersebut, Menteri Keuangan Australia Wayne Swan melakukan kunjungan di Hongkong dan Beijing pada Juli 2012. Dalam sebuah pertemuan di Hongkong pada Juli 2012.⁶⁴ Setelah melakukan pertemuan tersebut, Wayne Swan kembali melakukan pertemuan dalam sebuah forum tentang liberalisasi Yuan di Beijing. Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, Swan mengatakan bahwa Australia berharap dapat melakukan konversi mata uang langsung antara Dolar Australia dan Yuan Cina, sebab hal tersebut potensi untuk membantu mengurangi biaya perdagangan antara Australia dan Cina.

Hal tersebut kemudian mendapat respon positif dari pemerintah Cina, sehingga dalam kunjungan Julia Gillard di Shanghai pada Maret 2013, Gillard dan Presiden RRC Xin Jinping mencapai kesepakatan terkait konversi langsung mata uang Dolar Australia dengan Renminbi. Untuk proses awal, pemerintah Australia dengan segera akan mensosialisasikan penggunaan Yuan dalam transaksi perdagangan Australia-Cina, sebab untuk merubah sebuah kebiasaan masyarakat yang sudah terlebih dahulu menggunakan Dolar AS sebagai mata uang perantara tidaklah mudah. Sehingga konversi langsung Dolar Australia dengan Renminbi baru dapat dilaksanakan pada bulan April 2012, yang ditandai dengan permohonan lisensi oleh *Westpact Banking Corp* dan *Australia and New Zealand Bank (ANZ)* kepada bank sentral Cina untuk menjadi *market maker* atau pedagang utama bagi konversi langsung kedua valuta tersebut. Westpact bank dan ANZ merupakan dua dari empat bank terbesar di Australia, jika permohonan lisensi tersebut telah di terima, maka bank-bank besar di Australia seperti *National Australia Bank (NAB)* dan *Commonwealth Bank* akan turut serta menjadi bank resmi *marker* bagi konversi langsung Dolar Australia dan Renminbi. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, terhitung Mei 2013, para pengusaha atau pebisnis di Australia, dapat langsung menukarkan mata uang Dolar Australia dengan Yuan di bank-bank tersebut, tanpa

64 Skala News .maskapai meksiko borong 20 sukhoi. dalam <http://skalaneews.com/news/detail/117390/3/maskapai-meksiko-borong-20-sukhoi-superjet-100.html> di terbitkan pada 15 Februari 2012(diakses pada 9 Maret 2014)

harus menukarkan Dolar Australia dengan Dolar AS terlebih dahulu. Selain itu, dalam transaksi pembayaran, baik Australia dan Cina tidak lagi menggunakan Dolar Amerika. Namun dapat secara langsung menggunakan mata uang Dolar Australia atau Renminbi.

